

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Aceh Barat

2.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Barat

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah, yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan, yakni Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang, sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibu kotanya Tapak Tuan.

Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru, yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa. Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002.

2.1.2 Visi & Misi Kabupaten Aceh Barat

1) Visi :

"Terwujudnya aceh barat yang islami, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas"

2) Misi :

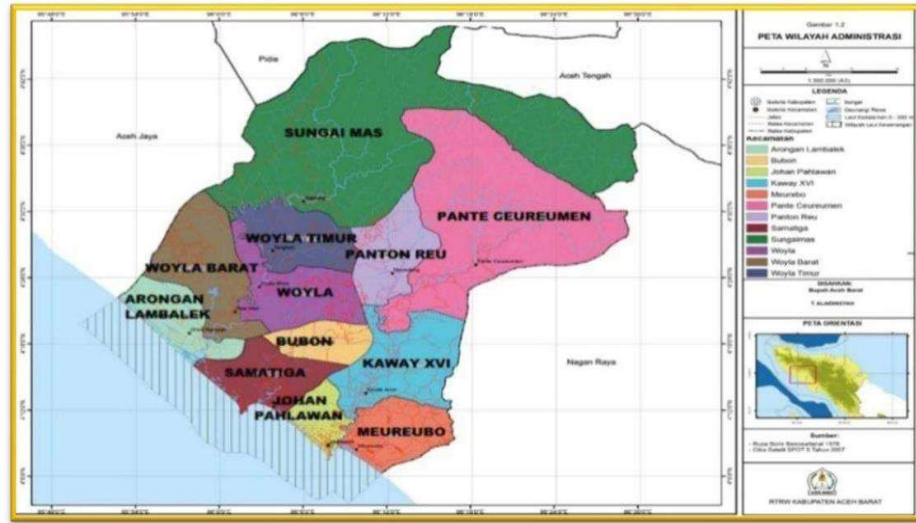
- a) Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar'i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih.
- b) Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA.
- c) Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan.
- d) Meningkatkan kesejahteraan Sumberdaya manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honoror) dan Tengku Dayah.

- e) Mengembalikan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya dan adat istiadat serta olahraga sesuai potensi kedaerahan.
- f) Pembangunan Prasarana dan Sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional.
- g) Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM kesehatan.
- h) Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat

2.1.3 Kondisi Geografis

Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km. Pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya
- Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
- Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RPJM Kab. Aceh Barat, Diolah Penulis (2023)

Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 Kecamatan, 36 mukim dan 322 gampong. Sebanyak 192 desa di antaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Johan Pahlawan	21	44.91 km ²
2	Samatiga	32	140.69 km ²
3	Bubon	17	129.58 km ²
4	Arongan Lambalek	27	130.06 km ²
5	Woyla	43	249.04 km ²
6	Woyla Barat	24	123 km ²
7	Woyla Timur	26	132.6 km ²
8	Kaway XVI	44	510.18 km ²
9	Meureubo	26	112.87 km ²
10	Pante Ceureumen	25	490.25 km ²
11	Panton Reu	19	83.04 km ²
12	Sungai Mas	18	781.73 km ²
Total		322	2.927,95 km ²

Sumber: Aceh Barat dalam angka 2023

2.1.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2022 sebanyak 200.579 jiwa yang terdiri atas 101.443 jiwa penduduk laki-laki dan 99.136 jiwa penduduk perempuan. Di antaranya sebanyak 197.121 pemeluk agama Islam yang artinya 99% penduduk Kabupaten Aceh Barat mayoritas memeluk agama Islam.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Dan Agama Di Kabupaten Aceh Barat

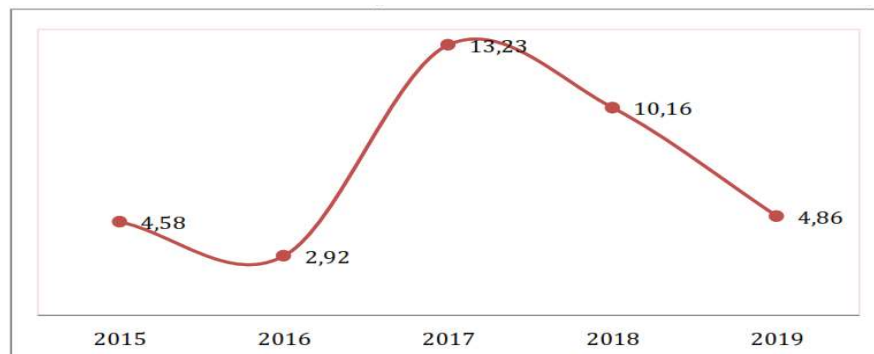
Kecamatan	Islam	Proestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Johan Pahlawan	62.444	286	53	-	665	-
Samatiga	15.845	4	-	-	-	-
Bubon	6.812	-	-	-	-	-
Arongan Lambalek	11.961	1	-	-	-	-
Woyla	13.662	3	-	-	-	-
Woyla Barat	7.845	-	-	-	-	-
Woyla Timur	5.263	-	-	-	-	-
Kaway XVI	21.107	8	-	-	-	-
Meureubo	29.958	99	5	-	32	-
Pante Ceureumer	11.322	-	1	-	-	-
Panton Reu	6.614	-	-	-	-	-
Sungai Mas	4.288	-	-	-	-	-
Total	197.121	401	59	-	697	-

Sumber: Kabupaten Aceh Barat dalam angka, 2023

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2019 sebesar 4,86 persen, dengan nilai tambah yang terbentuk sebesar 6,94 triliun rupiah angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai pertumbuhan sebesar 10,16 persen. Besarnya nilai PDRB Aceh Barat tersebut ditopang oleh kategori pertanian, kategori perdagangan dan kategori konstruksi. Kontribusi kategori pertanian terhadap total nilai PDRB tahun 2019 adalah sebesar 27,64 persen, diikuti oleh kategori pertambangan (19,85 persen) perdagangan (13,77 persen), kategori), kategori konstruksi (10,50 persen). Sementara kontribusi sektor lainnya sangat di bawah 10 persen. Apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan nilai PDRB Aceh Barat, hendaklah mengacu kepada kategori dominan ini. Apabila produksi bahan pertanian lebih ditingkatkan maka akan berpengaruh signifikan terhadap penambahan nilai tambah sektor perdagangan, pengangkutan dan industri.



Gambar 2. 2 Laju pertumbuhan ekonomi Kab. Aceh Barat (2015-2019)

Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, 2020

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 mencapai 13,23 persen, mengalami deselerasi menjadi 10,16 persen di tahun 2018 dan 4,86 persen pada tahun 2019. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa sektor yang mengalami

perlambatan, di antaranya adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor) serta administrasi pemerintahan.

Dari beberapa sektor di atas, pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mengalami deselerasi cukup signifikan. Produksi sektor ini didominasi oleh komoditas batubara, sedangkan sebagian kecilnya berupa material tambang golongan C (pasir dan batuan). Pada tahun 2017, sektor ini mengalami pertumbuhan hingga mencapai 116,71 persen, mengalami deselerasi pada tahun 2018 menjadi 40,84 persen hingga mencapai 7,02 persen pada tahun 2019.

2.2. Gambaran Umum Kecamatan Johan Pahlawan

Johan Pahlawan adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yang ibu kotanya Meulaboh yang menjadi tempat jalannya penelitian ini. yang terdiri dari 21 gampong dengan luas wilayah 44,91 Km². Batas wilayah dapat dilihat sebelah utara, Kecamatan Johan Pahlawan berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mereubo dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Samatiga. Kecamatan Johan Pahlawan memiliki jumlah penduduk 67.954 jiwa yang terdapat 34.441 laki-laki dan 33.531 perempuan, hal ini jika dilihat dari jumlah rumah tangga yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan sebanyak 17.093 jiwa.

Gampong yang terpadat penduduknyaitu Gampong Drien Rampak dengan jumlah 7.999 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah adalah gampong Suak Nie dengan jumlah 184 jiwa. Kecamatan terdekat dari pusat kota Meulaboh adalah Kecamatan Meureubo, Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Kaway XVI.

Sedangkan Kecamatan terjauh adalah Woyla Timur, Pantou Reu dan Sungai Mas. Luas Kecamatan Meureubo mencapai 112, 87 Km² yang terdiri dari 2 mukim dan 26 desa/gampong. Presentase terhadap luas Kabupaten 3,85%. (BPS Aceh Barat, 2021)

2.3. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas yang terletak di Kabupaten Aceh Barat yang berada di Wilayah Kecamatan Johan Pahlawan Jln. Imam Bonjol Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan. DLH bergerak di bidang lingkungan untuk membantu Bupati melaksanakan tugas khususnya pada pelaksanaan kebersihan lingkungan. Selain itu DLH menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh DLH mencakup juga bagian dari RTH yang merupakan bagian dari Kebersihan Lingkungan. Adapun RTH yang telah terealisasi median di Kabupaten Aceh Barat antara lain:

1. Jalan Nasional
2. Jalan Teuku Umar
3. Taman Hijrian
4. Taman Jembes
5. Taman Tugu Resamia (Ujung Kalak)
6. Taman Masjid Agung.

Taman-taman yang di atas merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan sampai sekarang dan masih banyak lainnya RTH yang telah diterapkan

yang setiap tahunnya ada yang dirahabilitasi dan ada pembangunan pada RTH dikawasan perkotaan.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas DLH Kabupaten Aceh Barat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup untuk melaksanakan tugas tersebut DLH berkewajiban menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengeordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pengendalian pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;
3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
5. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten;
6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten;
7. Pelaksanaan Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) kabupaten sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
9. Pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) keberadaan kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
10. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
11. Pengeordinasian dan fasilitasi penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
12. Penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
13. Pengelolaan persampahan;

14. Penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) dilingkungan Dinas;
15. Pengelolaan ruang terbuka hijau dan konservasi lingkungan; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

a. Seksi Ruang Terbuka Hijau

Seksi Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi kewenangan Kabupaten. Seksi Ruang Terbuka Hijau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan kebutuhan sarana prasarana RTH;
2. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan RTH;
3. Pelaksanaan pelestarian dan perlindungan tanaman taman dan penghijauan;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban penanaman tanaman penghijauan;
5. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan taman dan RTH;
6. Penyiapan rekomendasi pertimbangan perizinan penggunaan RTH;
7. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaranan pertamanan;
8. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan permakaman umum yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.3.2 Visi dan Misi Dinas Dinas Llingkungan Hidup

- a. Visi dan misi dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Visi Dinas Liangkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, bersih, hijau dan lestari.	Berkelanjutan	Mengandung makna bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus mempunyai dan melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan.
	Bersih	Mengandung makna bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Baratharus dapat menempatkan diri sebagai motivator dan fasilitator dalam hal mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih, sehat dan bebas sampah melalui upaya peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan.
	Hijau	Mengandung makna bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat harus dapat menjadi fasilitator dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
	Lestari	Mengandung makna bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat harus melakukan upaya-upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiat

b. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat 2017-2022

Secara umum, misi Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan semua misi Kabupaten Aceh Barat. Hanya saja misi Dinas Lingkungan Hidup lebih terarah pada aspek lingkungan di antaranya:

1. Menyusun kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi.
2. Meningkatkan pengawasan, pencegahan, dan pengendalian kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber daya alam.
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kemitraan dalam proses pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko bencana.
4. Meningkatkan pengelolaan kebersihan lingkungan.
5. Meningkatkan kawasan runag terbuka hijau secara proporsional.
6. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan konservasi sumber daya alam, mitigasi dan perubahan iklim

c. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat sejalan dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Menindaklanjuti tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2022, adapun yang menjadi Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan operasional dan administrasi pelayanan OPD.

2. Mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari sampah.
3. Meningkatkan kenyamanan masyarakat terhadap lingkungan hidup.
4. Menjamin tetap lestarnya potensi keanekaragaman hayati dalam rangka mengurangi dan memperkecil dampak perubahan iklim.
5. Memberikan informasi/pengetahuan lingkungan hidup yang memadai ke masyarakat.
6. Mewujudkan kualitas, keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan alam kawasan yang ramah lingkungan dengan jumlah yang proporsional

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan OPD.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana OPD.
3. Meningkatkan kualitas SDM serta pelayanan terhadap masyarakat.
4. Meningkatnya keterkaitan antara dokumen perencanaan dan pelaporan.
5. Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan persampahan.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap dampak buruk perusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan dan konsekuensi hukum yang akan diperoleh.
8. Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis.
9. Penanganan terhadap konflik gajah liar.

10. Meningkatnya pengetahuan lingkungan hidup bagi masyarakat.

11. Meningkatnya jumlah ruang terbuka hijau yang sehat, indah, bersih dan nyaman serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Selain itu DLH Kabupten Aceh Barat juga memiliki moto pelayanan, maklumat pelayanan, dan janji pelayanan. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Moto pelayanan : kami dengar, kami lihat, kami dating, kami tindak.

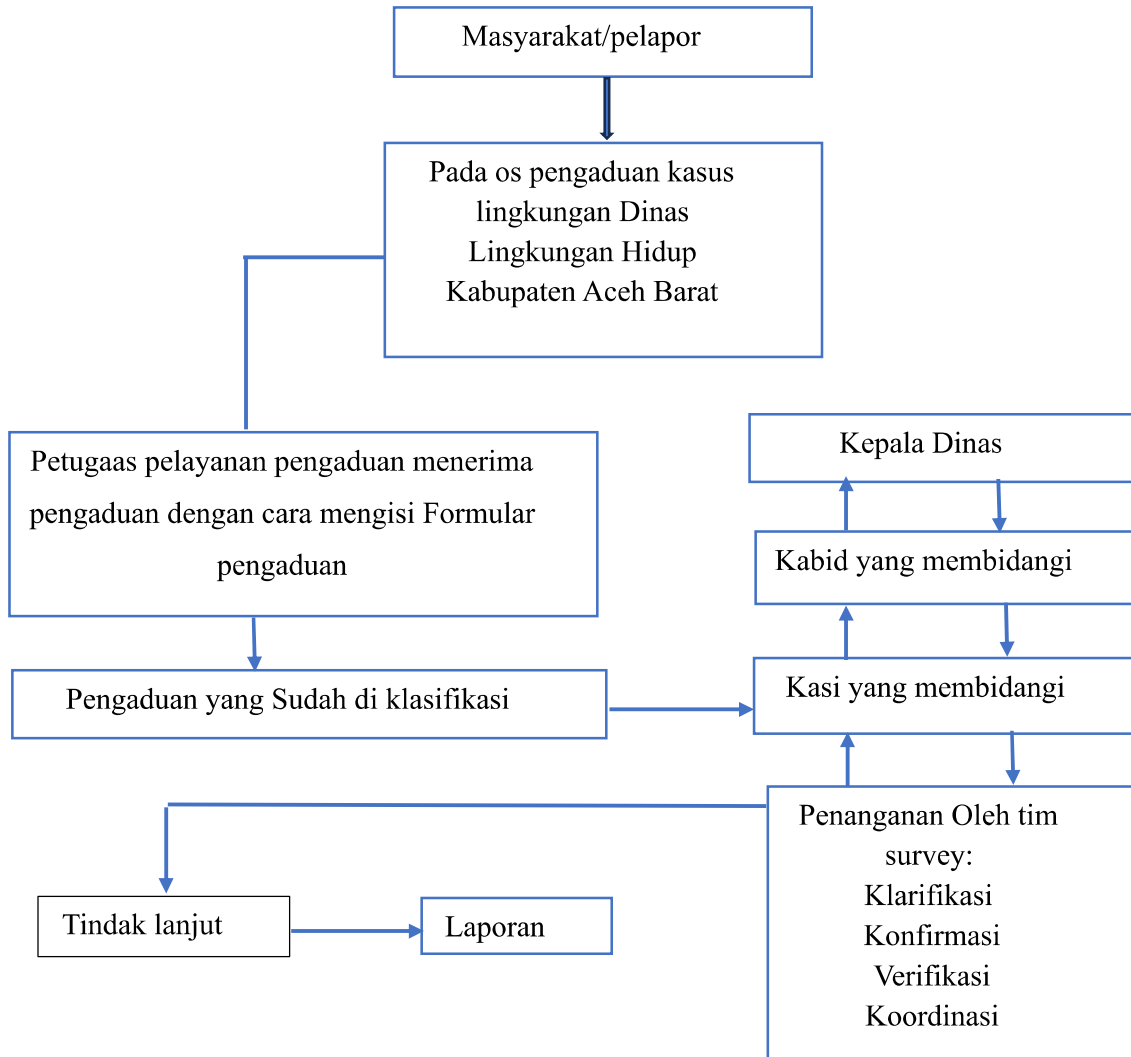
Maklumat pelayanan : dengan ini kami menyatakan sanggup:

1. Memberikan layanan dengan cepat dan akurat.
2. Memberikan informasi yang tepat.
3. Memberikan respon yang cepat terhadap keluhan.
4. Menyiapkan petugas yang berdedikasi dan siap melayani.

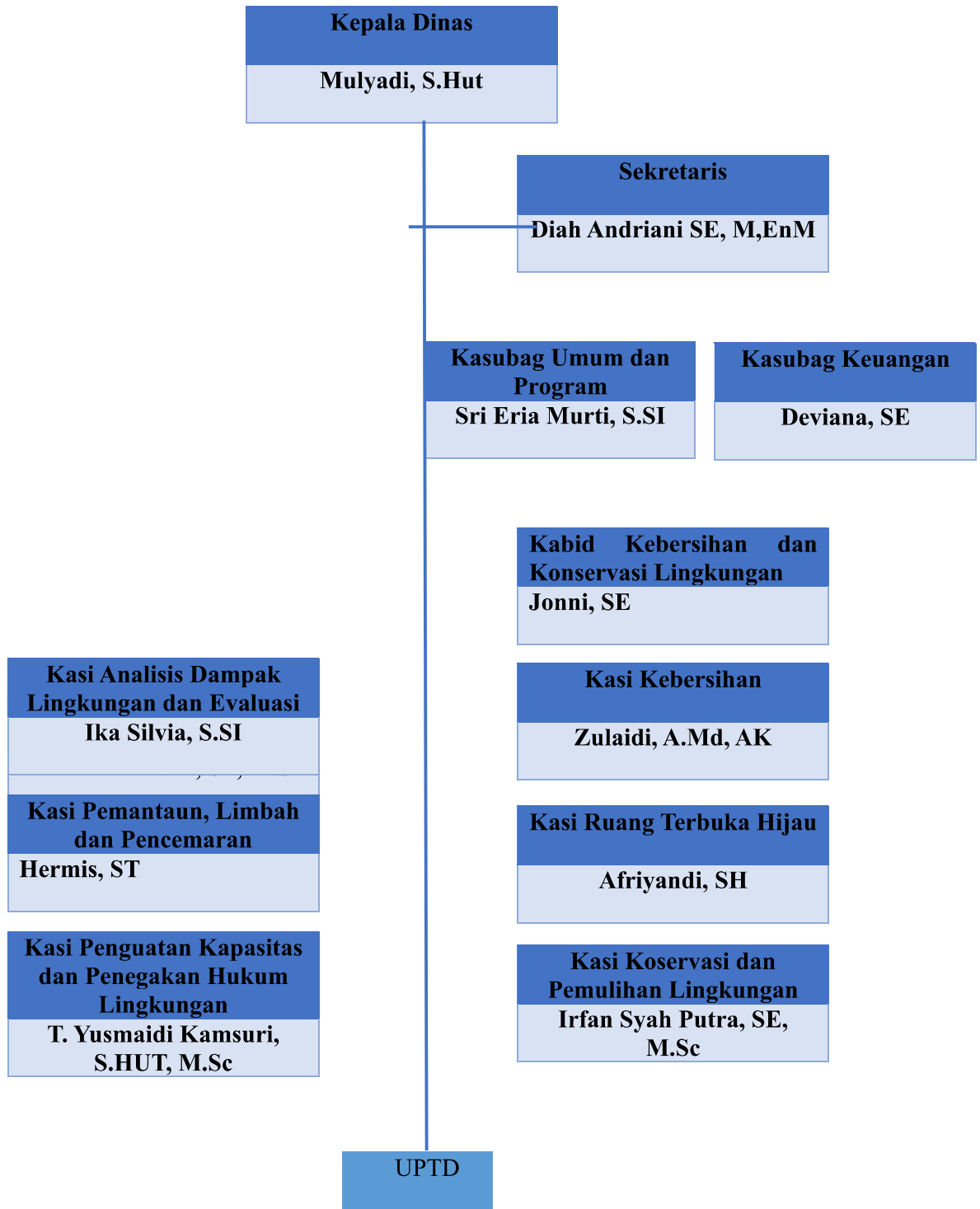
Janji pelayanan:

1. Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
2. Anda sehat dan lingkungan anda bersih kami senang.
3. Merupakan komitmen kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan pelayanan terbaik untuk bidang lingkungan hidup.
4. Tidak melakukan praktek KKN dalam memberikan pelayanan.
5. Memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa ada perbedaan status dan golongan.

Kemudian juga memiliki bagan pelayanan pengaduan kasus lingkungan, yaitu:



Gambar 2. 3 Bagan pelayanan Pengaduan Kasus Lingkungan



Gambar 2. 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Aceh Barat.

DLH Kabupaten Aceh Barat memiliki Sumber Daya berjumlah sebanyak 57 pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 29 pegawai dan non PNS sebanyak 28 pegawai. Berikut Tabel 2.4 di bawah ini ditampilkan data jumlah PNS berdasarkan tingkat golongan pada DLH Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persen
1.	Golongan IV	7	23
2.	Golongan III	15	50
3	Golongan II	7	23
4.	Golongan I	1	4
JUMLAH		30	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Desember 2023

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, PNS DLH Kabupaten Aceh Barat di dominasi oleh tingkat golongan III sebanyak 50% selanjutnya golongan IV dan golongan II sebanyak 23% sementara golongan I sebanyak 4%.

Tabel 2. 4
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan tingkat golongan

No	Golongan	Jumlah	Persen
1.	Golongan IV	7	12
2.	Golongan III	15	27
3.	Golongan II	7	12
4.	Golongan I	1	2
5.	Non PNS	27	47
JUMLAH		57	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Desember 2023

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, presentase jumlah pegawai PNS dan non PNS DLH Kabupaten Aceh Barat, tingkat golongan terbesar adalah PNS golongan III

sebesar 27% dan non PNS, yakni sebesar 47%, selanjutnya golongan IV dan golongan II sebanyak 12% serta golongan I sebanyak 2%.

Tabel 2. 5
Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	PNS TK.Pendidikan			Non PNS TK.Pendidikan			Jumlah	Persen
1.	Strata 2	8	27	Strata 2	0	0	8	14
2.	Strata 1	11	37	Strata 1	14	52	25	44
3.	Diploma 3	1	3	Diploma 3	2	7	3	5
4.	SLTA	9	30	SLTA	11	41	21	35
5.	STP	1	3	STP	0	0	1	2
JUMLAH		30	100		27	100	57	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Desember 2023

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, bahwa sumber daya yang dimiliki DLH Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh strata 1 sebesar 44%, dan didominasi oleh SLTA sebanyak 35%, selanjutnya didominasi strata 2 sebanyak 14%, dan didominasi Diploma 3 sebanyak 5% dan SLTP sebanyak 2%.